
DARMA ABDI KARYA

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

VOLUME 3 NO 2
DESEMBER 2024

darmaabdikarya@plb.ac.id

e-ISSN: 2986-8696

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MELALUI OSS-RBA DI DPMPTSP KABUPATEN BANTUL

Wiyunnita¹, Eka Dyah Ayu Astuti² Tri
Rochmadi³

Sistem Informasi, Universitas Alma Ata^{1,2,3}

Article history

Received : 26 Desember 2024

Revised : 30 Desember 2024

Accepted : 30 Desember 2024

*Corresponding author

Email : trirochmadi@almaata.ac.id

ABSTRAK

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau OSS-Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan langkah inovatif dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Sistem perizinan ini berguna untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerbitkan izin berusaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul sebagai objek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan OSS-RBA, Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi OSS-RBA dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Penghambat dalam pelaksanaan OSS-RBA oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul. Temuan yang peneliti dapati selama melaksanakan penelitian yaitu OSS-RBA sangat membantu masyarakat yang mengalami kendala dengan permasalahan jarak sehingga tidak bisa untuk datang ke DPMPTSP untuk mengurus perizinan dan juga peneliti mendapati masyarakat yang memang belum sepenuhnya mengetahui bahwa adanya kebijakan OSS-RBA ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan OSS-RBA memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya yang berada atau tinggal jauh dari DPMPTSP serta sangat membantu masyarakat yang tidak bisa datang ke DPMPTSP. Adapun saran dari penulis kepada DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan sosialisasi secara meluas, mengatasi hambatan jaringan internet, meningkatkan lagi kualitas dari sumber daya manusia guna memaksimalkan pelayanan dari kebijakan OSS-RBA.

Kata Kunci: bimbingan teknis; OSS-RBA; Perizinan

ABSTRACT

Implementing the risk-based business licensing system or OSS-risk-based approach (OSS-RBA) is an innovative step in government administration that will improve efficiency, transparency, and openness in the business licensing process in Indonesia. This licensing system is useful for facilitating business actors in issuing business licenses. This study uses a descriptive qualitative method that makes the Bantul Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) as the object. This study aims to determine the implementation of the OSS-RBA Policy, Factors that inhibit the implementation of OSS-RBA, and Efforts made to overcome Obstacles in implementing OSS-RBA by the Bantul Regency DPMPTSP. The findings that researchers found during the study were that OSS-RBA was very helpful for people who experienced obstacles with distance problems so that they could not come to the DPMPTSP to take care of permits and researchers also found people who were not fully aware of the existence of this OSS-RBA policy. Based on the research that has been conducted, the author concludes that the implementation of the OSS-RBA policy provides benefits to the community, especially those who are or live far from DPMPTSP, and is very helpful for people who cannot come to DPMPTSP. The author's suggestion to DPMPTSP Bantul Regency is to optimize widespread socialization, overcome internet network obstacles, and improve the quality of human resources to maximize services from the OSS-RBA policy.

Keywords: technical guidance; OSS-RBA; Licensing

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berbasis elektronik pada sistem pemerintahan di Indonesia sering dikenal masyarakat dengan sebutan E- Government. E-Government itu sendiri merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public (Banamtuan et al., n.d.). Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi harapan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini kebutuhan masyarakat yang meningkat memerlukan perhatian pemerintah akan pengembangan pada sektor pelayanan publik (Sutisnawinata, 2023). Salah satunya pelayanan publik dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah proses perizinan berusaha. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) berbasis risiko yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang (Rokhman et al., 2024). Adapun tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM Pasar Kebon Empring tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mengurus NIB melalui sistem OSS (Pengabdian Masyarakat dan aplikasi Teknologi et al., 2023).

Adanya OSS-RBA memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan izin secara online dengan lebih efisien dan transparan. Perizinan melalui sistem OSS RBA pelaku usaha cukup mengisi data di sistem dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses perizinan tanpa harus mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) (Ginting et al., 2022). Salah satu pasal perizinan yang ada di dalam OSS-RBA yaitu mengenai NIB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menyatakan bahwa nomor induk berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional (Pengabdian Masyarakat dan aplikasi Teknologi et al., 2023). Sistem OSS-RBA sendiri menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menilai tingkat risiko dari jenis usaha, sehingga memudahkan dalam pemberian izin yang lebih cepat kepada pelaku usaha yang memiliki risiko yang rendah. Tidak hanya pelayanan izin usaha secara online, OSS-RBA juga menyediakan layanan lainnya yang terintegrasi oleh instansi lainnya, sehingga memudahkan para pemohon untuk mengurus berbagai izin dan perizinan dari berbagai instansi pemerintah secara terpadu melalui satu platform digital. Dengan adanya OSS-RBA ini dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, juga membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mengundang investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Rokhman et al., 2024).

Salah satu instansi yang menerapkan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. DPMTSP Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengenalan (sosialisasi) sistem OSS kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo sebagai pengguna layanan perizinan berusaha. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem OSS telah dimulai sejak 2018 dan semakin digencarkan pada 2024 (Akmal, 2021). OSS-RBA merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi untuk membantu proses pengajuan, pengaduan, dan perizinan yang selanjutnya akan dilakukan proses tindakan. Penerapan OSS-RBA diharapkan agar bisa menghemat waktu dalam proses pemberian izin berusaha (Sanjaya et al., n.d.). OSS berbasis risiko harus mempermudah dengan menyediakan platform yang mudah digunakan dan prosedur yang jelas bagi pelaku usaha untuk mengajukan izin secara daring. Selain itu, sistem ini diharapkan memberikan kepastian dengan menetapkan tenggat waktu yang pasti untuk proses perizinan serta memberikan umpan balik yang cepat kepada pemohon. Keadilan juga perlu dijamin melalui proses yang transparan dan non-diskriminatif dalam penilaian risiko dan pemberian izin (Rokhman et al., 2024).

Adapun implementasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul diterapkan pada bimbingan teknis yang dilakukan untuk mendampingi para pelaku usaha yang ada di daerah Kabupaten Bantul. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul sendiri tidak hanya terbatas pelaku usaha dalam sebuah perusahaan, tetapi juga dalam sektor pertanian serta UMKM. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul biasanya menghadirkan beberapa narasumber untuk menyampaikan materi terkait dengan maksud bimbingan teknis yang telah diadakan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat penelitian sedang berlangsung yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan menyusunnya dalam suatu klasifikasi tertentu kemudian menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian (Nurjamal et al., n.d.). Hal tersebut menjadikan penelitian lebih terarah dan memberikan penjelasan terhadap berbagai fakta yang terjadi dan dapat menerangkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan (Rosidi, n.d.). Kegiatan bimbingan teknis ini melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut ini adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan, seperti Gambar 1 (Monica et al., 2023).



Gambar 1. Alur Kegiatan Bimbingan Teknis

Metode pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang dijelaskan oleh pelaku usaha ke tim kerja bimbingan teknis. Sasaran peserta dalam kegiatan bimbingan teknis ini menyasar pelaku usaha di Kabupaten Bantul. Dalam mengatasi masalah yang dijelaskan oleh pelaku usaha maka DPMPTSP Kabupaten Bantul memberikan solusi dengan mengadakan kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan program bimbingan teknis terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut ini adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, Tim kerja bimbingan teknis melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan pelaku usaha mengenai kegiatan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan serta membahas materi yang akan diberikan pada bimbingan teknis yang akan dilaksanakan.
2. Pelaksanaan
 - a. Pengisian daftar hadir
 - b. Pembukaan
 - c. Sosialisasi
 - d. Ice breaking
 - e. Tanya Jawab
 - f. Penutup dan ramah tamah
3. Evaluasi

Pada tahap ini, tim kerja bimbingan teknis melakukan evaluasi mengenai bimbingan teknis yang telah dilakukan. Evaluasi didapat dari hasil kuesioner yang telah dibagikan pada saat bimbingan teknis berlangsung dan diisi oleh peserta bimbingan teknis. Hasil dari kuesioner yang diisi oleh peserta menjadi bahan acuan evaluasi tim kerja bimbingan teknis agar pada bimbingan teknis berikutnya bisa lebih baik lagi.

PEMBAHASAN

Hasil dari rapat koordinasi pada tahap persiapan mendapatkan hasil mengenai topik yang dipilih adalah melakukan bimbingan teknis dan memberikan edukasi tentang implementasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA bagi pelaku usaha di era digital. Pelaksanaan kegiatan dari bimbingan teknis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan	Keterangan
Pengisian daftar hadir	Scan barcode dan pembagian kuesioner
Pembukaan	Sambutan-sambutan
Sosialisasi	Penyampaian materi oleh narasumber
Ice breaking	Gerak tubuh
Tanya jawab	Tanya jawab antara narasumber dengan peserta
Penutup dan ramah tamah	Pengumpulan kuesioner dan makan bersama

Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir dari bulan Oktober - November 2024 DPMPTSP Kabupaten Bantul telah melaksanakan bimbingan teknis sebanyak 4 kali dengan berbagai sektor pelaku usaha yang berbeda-beda. Dalam waktu 2 bulan tersebut DPMPTSP Kabupaten Bantul telah melakukan bimbingan teknis pada anggota HIPMI, PBJI, perwakilan perusahaan, serta anggota KWT di Kabupaten Bantul. Bimbingan teknis yang dilakukan selama 2 bulan terakhir mendapatkan cukup banyak perhatian dimana dapat dilihat pada tabel 2, mengenai jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis dalam 2 bulan terakhir.

Tabel 2. Bimbingan Teknis Bulan Oktober - November

Tanggal	Jenis Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta
2 Oktober 2024	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul.	30
9 Oktober 2024	Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian di Kabupaten Bantul (Kegiatan Usaha Olahan Pangan pada Kelompok Wanita Tani) di Kabupaten Bantul	44
13 November 2024	Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Anggota DPC PPJI (Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia) Kabupaten Bantul Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Anggota DPC PPJI (Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia) Kabupaten Bantul.	39
20 November 2024	Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	42

Risiko Bagi Anggota BPC HIPMI (HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA) Kabupaten Bantul Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Anggota BPC HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kabupaten Bantul



Gambar 2. Kegiatan bimbingan teknis dan foto bersama

Dalam bimbingan teknis yang telah dilakukan, DPMPTSP Kabupaten Bantul memberikan informasi mengenai implementasi OSS-RBA terhadap pelaku usaha agar pelaku usaha semakin mengerti akan pentingnya pengurusan izin berusaha. Dalam bimbingan teknis tersebut DPMPTSP Kabupaten Bantul juga memberikan solusi apabila kurang paham dalam pengurusan izin di OSS-RBA para pelaku usaha juga bisa datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Bantul dibantu dalam pembuatan izin usaha di OSS-RBA. Dengan adanya inovasi dan solusi yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul tersebut maka mendorong implementasi OSS-RBA untuk masyarakat (Sanjaya et al., n.d.)

Kegiatan bimbingan teknis ini diakhiri dengan penutup dan ramah tamah, untuk penutup dilakukan dengan pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh peserta bimbingan teknis. Kuesioner yang telah diisi akan menjadi bahan evaluasi bagi tim kerja bimbingan teknis DPMPTSP Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk ramah tamah diisi dengan acara makan bersama dengan seluruh peserta dan tim kerja bimbingan teknis.

SIMPULAN

Penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan efisiensi bagi pelaku usaha. Sistem ini menggunakan pendekatan berbasis risiko yang memprioritaskan pemberian izin kepada usaha berisiko rendah dan menyediakan layanan terintegrasi dari berbagai instansi melalui satu platform digital. Untuk mendukung implementasi OSS-RBA, DPMPTSP Kabupaten Bantul mengadakan bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk umkm dan sektor pertanian. Bimbingan teknis dilakukan dalam tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, tanya jawab, dan pengumpulan kuesioner untuk evaluasi.

Dalam periode Oktober-November 2024, DPMPTSP Kabupaten Bantul berhasil melaksanakan empat sesi bimbingan teknis yang dihadiri oleh berbagai kelompok usaha, seperti hipmi, pbji, dan kwt. Hasil dari bimbingan teknis ini menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap OSS-RBA serta mendorong kemudahan dalam pengurusan izin usaha, sehingga hal tersebut dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing investasi. Evaluasi kegiatan ini dilakukan melalui kuesioner yang menjadi dasar perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2021). Indonesian State of Law is an Aspired Concept. *Nurani Hukum*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i1.9265>
- Banamtuan, R., Kupang, A. K., Tenggara, N., Program, T., Administrasi, S., & Daerah, P. (n.d.). IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. <http://www.m.liputan6.com>
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL BERBASIS OSS RBA DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Monica, D., Ayu, D., Adhiya, P., & Putri, G. (2023). MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI MELALUI BIMBINGAN TEKNIS OSS RBA DAN LKPM ONLINE KOTA BLITAR. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2889–2894. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6546>
- Nurjamal, A., Vestikowati, E., & Yuliani, D. (n.d.). PELAYANAN PERIZINAN NOMOR INDUK BERUSAHA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS.
- Pengabdian Masyarakat dan aplikasi Teknologi, J., Wicaksono, Y., Nur Rachman Dzakiyullah, R., Rochmadi, T., Mukhammad Izzat Azizi Muzaki, dan, Studi Sistem Informasi Universitas Alma Ata, P., Brawijaya No, J., Kasihan, K., Bantul, K., & Istimewa Yogyakarta, D. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB pada Pelaku UMKM Pasar Kebon Empring. In *Jurnal ADIPATI* (Vol. 02, Issue 02). <https://ejurnal.itats.ac.id/adipati/>
- Rokhman, B., Rokhman, A., Kurniasih, D., Magister Administrasi Publik Fakultas, P., & Bakhrur Rokhman, C. (2024). RISK-BASED BUSINESS LICENSING IMPLEMENTATION THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Rosidi, D. (n.d.). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang (Vol. 4). <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Sanjaya, J., Pendaftaran, A., Pangkalpinang, K., Bangka, K., Program, B., Studi, S., Publik, K., Skripsi, P., Azikin, A., & Si, M. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG.
- Sutisnawinata, A. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang. 5(2).